

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi tidak kunjung henti terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut juga terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa pembatasan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun upaya pemerintah pusat memulihkan perekonomian pasca Covid-19 berupa penyediaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah daerah juga tak luput dikorupsi. Modus yang digunakan yaitu memanfaatkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai kewenangan mengelola anggaran untuk menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian berjudul “Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Penggunaan Saksi Mahkota Pejabat Perbendaharaan Negara” oleh Fathul Yasir Fuadi dari Program Studi Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan dibimbing oleh Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Dr. Budiyo, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II .

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas keterangan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam penyertaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ditemukan hasil kesaksian pejabat perbendaharaan negara sebagai saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah efektif karena kesaksian pejabat perbendaharaan negara menjadi penyambung dalam suatu kesaksian berantai (*kettingbewijs*) dan menjadi sarana pertemuan kehendak (*meeting of mind*) antara pemberi dan penerima suap. Sebagai pejabat yang mengelola keuangan negara, keterangan pejabat perbendaharaan negara dapat membongkar siapa pelaku utama dari tindak pidana korupsi berupa suap tersebut. Adapun kedudukan saksi mahkota pejabat perbendaharaan negara dalam penyertaan tindak pidana korupsi adalah sebagai *medepleger* (turut serta) dengan *pleger* (pelaku) yaitu pejabat yang lebih tinggi selaku pemberi delegasi tugas perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan menjadi *medepleger* sepanjang terpenuhi syarat menjadi *medepleger*, yaitu kerja sama yang merupakan kehendak bersama tersebut disadari oleh para pelaku dan para pelaku bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Kata Kunci : Korupsi, Saksi Mahkota, Pejabat Perbendaharaan Negara

SUMMARY:

Corruption crimes continue to occur in Indonesia without stopping. Even when the Covid-19 pandemic hit Indonesia, the government's efforts to fulfil the needs of citizens during the activity restrictions as an effort to prevent the spread of Covid-19 by providing social assistance in the form of basic food needs and the central government's efforts to revive the economy post-Covid-19 by providing the National Economic Recovery Fund (PEN) to local governments were also not immune to corruption. The modus operandi used is by exploiting the authority of the Budget User and the Commitment Maker Officer as state treasury officials who have the authority to manage budgets to abuse their power.

Based on this background, a study entitled "The Effectiveness of Corruption Criminal Prosecution by Using State Treasury Officials as Crown Witnesses" was conducted by Fathul Yasir Fuadi from the Master of Law Program at Jenderal Soedirman University, supervised by Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. as 1st Advisor and Dr. Budiyo, S.H., M.Hum., as 2nd Advisor.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of state treasury officials as crown witnesses in proving corruption crimes and to determine the position of state treasury officials as crown witnesses in the commission of corruption crimes.

Based on the results of the study, it was found that the testimony of state treasury officials as crown witnesses in proving corruption crimes is effective because their testimony serves as a link in a chain of evidence (kettingbewijs) and as a means of meeting of minds between the giver and receiver of bribes. As officials who manage state finances, the testimony of state treasury officials can uncover the main perpetrators of corruption crimes in the form of bribery. The position of state treasury officials as crown witnesses in the commission of corruption crimes is as a the medepleger (accomplice) with the pleger (perpetrator) is the higher official as the delegator of treasury duties. State treasury officials become medepleger as long as the requirements for being a medepleger are met, which is the joint collaboration are realized by the perpetrators, and the perpetrators do the will together.

Keywords: *Corruption, Crown Witnesses, State Treasury Officials.*